



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Beni Nugraha  
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Puji Winarni  
Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Puji Winarni

Jakarta, Maret 2018

Pihak Pertama

M. Beni Nugraha



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>Stakeholder Perspectives</b>		
1 Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia	1 % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	100 %
	2 Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	13 orang
2 Meningkatkan citra kelembagaan BSN	3 % berita positif terkait BSN	100 %
3 Meningkatkan pelayanan publik dan layanan prima di lingkungan BSN	4 Indeks kepuasan layanan internal	3.4 nilai
<b>Internal Process Perspectives</b>		
4 Meningkatkan penyelenggaraan layanan dan bantuan hukum	5 % pemberian bantuan hukum	70 %
	6 Jumlah penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan bidang SPK	8 penyuluhan
	7 % peraturan perundangan yang diunggah	80 %
5 Meningkatkan pengelolaan ASN BSN	8 % pemenuhan kebutuhan ASN BSN sesuai ABK	70 %
6 Meningkatkan kesesuaian peraturan perundangan di bidang SPK	9 Jumlah peraturan perundang – undangan di bidang SPK	9 peraturan
7 Meningkatkan pengelolaan publikasi kepada masyarakat	10 Jumlah pameran standardisasi yang diikuti BSN	11 pameran
	11 Jumlah publikasi kelembagaan	1250 publikasi
8 Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sektoral	12 Jumlah sektor yang ditangani	3 sektor
9 Meningkatkan upaya penataan pengelolaan organisasi	13 % Pelaksanaan RB sesuai dengan roadmap dan rencana aksi RB	100 %
	14 % pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	100 %
10 Meningkatkan harmonisasi peraturan perundangan di bidang SPK	15 % peraturan perundang – undangan yang harmonis di bidang SPK	100 %



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Learning and Growth Perspectives</b>		
11 Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di Biro HOH	16 Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)	83 nilai
	17 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)	70 (BB) nilai
12 Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Biro HOH	18 % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	100 %
	19 Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	2 orang
13 Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Biro HOH	20 % Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN	100 %
	21 % Pemanfaatan BMN	100 %
14 Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Biro HOH	22 % Realisasi Anggaran	≥95 %

Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1 Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN	4,638,780,000
2 Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	917,229,000
Jumlah	<u>5,556,009,000</u>

Jakarta, Maret 2018

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Puji Winarni

M. Beni Nugraha